



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025

---

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12

Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185

PALANGKA RAYA 73112

Tahun 2026



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Berbagai kendala dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial antara lain terbatasnya dana, sarana, prasarana dan tenaga baik kualitas maupun kuantitas, sehingga kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum dapat mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan secara optimal. Namun demikian secara umum pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai rencana.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan Pengukuran Kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan selama Tahun 2025.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Januari 2026

Kepala Dinas,



**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 200312 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 perubahan kedua atas peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 37 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan korban bencana alam dan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan korban bencana alam dan sosial.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan korban bencana alam dan sosial.
3. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan korban bencana alam dan sosial.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan korban bencana alam dan sosial; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

Dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Teknis dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Tingkat capaian kinerja bersumber dana APBD mencapai realisasi fisik 90.00%.
3. Anggaran Dinas Sosial dana APBD Tahun 2025 sebesar yaitu Rp. 40.764.265.004 (empat puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat rupiah).
4. Pelaksanaan program telah sesuai dengan Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
5. Indikator Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :
  - a. Adanya peningkatan perubahan perilaku dari masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar.
  - b. Adanya peningkatan kesejahteraan penerima manfaat setelah mendapatkan bimbingan sosial dan keterampilan.
  - c. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan program pelayanan sosial.
  - d. Meningkatnya peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan permasalahan sosial di Kalimantan Tengah.
6. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan secara detail, perlu adanya survey lebih lanjut dan memerlukan waktu serta pembiayaan yang cukup memadai, namun sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
7. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan penguatan anggaran yang terfokus kepada Sasaran Strategis yang dimiliki Dinas Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan korban bencana alam dan sosia

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB.I PENDAHULUAN	1
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Dan Misi .....	13
B. Tujuan dan Sasaran .....	17
C. Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	19
D. Penetapan Kinerja 2025 .....	20
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
B. Realisasi Anggaran .....	43
BAB.IV PENUTUP	
A. Penutup.....	49
B. Saran.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**A. LATAR BELAKANG**

Sebagai bagian dari proses Pembangunan Nasional, Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yang menjamin setiap warga Negara untuk dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidupnya serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan meningkatkan potensi dan sumber pelayanan sosial dasar yang tersedia serta dapat berperan aktif dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami dan melaksanakan proses pembangunan kesejahteraan sosial. Agar proses dimaksud dapat berjalan dengan terencana, terintegrasi, terarah dan berkesinambungan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Dinas Sosial sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, berbagai Program dan Kegiatan baik yang bersumber dana APBD Provinsi maupun APBN secara integratif telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng masa Jabatan 2025-2030, dan bukan bersifat final karena pada tahun-tahun yang akan datang program dan kegiatan dimaksud akan berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, disusun sebagai dokumen evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Adapun materi dan substansi yang terdapat didalamnya adalah Penetapan Kinerja Tahunan 2025, Pengukuran Pencapaian Sasaran 2025, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan 2025.

## **B. KEDUDUKAN**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi (Palangka Raya). Dasar hukum organisasi adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 perubahan kedua atas peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 37 tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.
3. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Korban bencana alam dan sosial,

**UPTD** : terdiri dari 4 (empat) panti yaitu:

1. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "MAJAR TABELA"
  - a. Kepala Panti
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kasi Program dan Advokasi sosial
  - d. Kasi Rehabilitasi Sosial
2. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "RUHUI RAHAYU"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha

3. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sinta Rangkang"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kasi Program dan Advokasi sosial
- d. Kasi Rehabilitasi Sosial

4. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) "PAMBELUM"

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kasi Program dan Advokasi sosial
- d. Kasi Rehabilitasi Sosial

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



## STRUKTUR ORGANISASI UPT PSTW SINTA RANGKANG



**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PSBR MAJAR TABELA**

**KEPALA UPT. PSBR**  
**ISMAMAH, SE**  
NIP. 19730819 199002 2 002  
TTL : Banjarmasin, 19 Agt 1973  
Pangkat Tk. I (III/d) : TMT 1 Okt 2015  
TMT Jabatan 13 Feb 2023



**KASUBAG TATA USAHA**  
**MENDRA PURNAMA, S.IP**  
NIP. 19710809 199201 006  
TTL : Kapuas Barat, 9 Jun 1971  
Pangkat Tk. I (III/d) : TMT 1 Okt 2014  
TMT Jabatan 12 Apr 2022



**PH. KASI PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL**  
**YUJI KUSTANTI, A.KS, M.Si**  
NIP. 19720113 199401 204  
TTL : Purworejo, 23 Jun 1972  
Pangkat Tk. I (III/d) : TMT 01 April 2020



**PH. KASI REHABILITASI SOSIAL**  
**ALDILA PUTRI PERTWI, S.ST**  
NIP. 19891213 201503 2001  
TTL : Samarinda, 13/12/1989  
Pangkat Madya Tingkat I (III/b) : TMT 01 April 2020



**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PSBL PABELUM**

**KEPALA UPT. PSBR**  
**drg. SARITA ARITOMANG**  
NIP. 19690619 199803 2 005  
TTL : Medan, 19 Jun 1969  
Pangkat Tk. I (IV/b) : TMT 1 Apr 2018  
TMT Jabatan 19 Mar 2018



**KASUBAG TATA USAHA**  
**ENDANG YULIANTE, SE**  
NIP. 19750725 200804 2 019  
TTL : P. Raya, 25 Jul 1975  
Pangkat (III/c) : TMT 1 Apr 2022  
TMT Jabatan 14 Feb 2023



**PH. KASI PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL**  
**JUNHUS SAPUTRA, S.ST**  
NIP. 19870609 201901 001  
TTL : Kapuas, 09 Jun 1987  
Pangkat Madya Tingkat I (III/b) : TMT 1 Apr 2014




**PH. KASI REHABILITASI SOSIAL**  
**FRANKLIN HELMI, SH**  
NIP. 19720414 199202 1 002  
TTL : P. Raya, 14 Apr 1972  
Pangkat (III/c) : TMT 1 Apr 2019  
TMT Jabatan 1 Sept 2023



**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PSKW RUHUI RAHAYU**

**KEPALA UPT. PSKW**  
**ARRUNG N. PASOLANG, SKM., M.Si**  
NIP. 19700127 199803 2 005  
TTL : Rantepao, 27 Jan 1970  
Pembina Tk. I (IV/b) : TMT 1 Apr 2018  
TMT Jabatan 19 Mar 2018



**KASUBAG TATA USAHA**  
**SAHMAN RASYID, S.Pd, MM**  
NIP. 19690508 199103 1 010  
TTL : Tabelong, 8 Mei 1969  
Pembina (IV/a) : TMT 1 Apr 2022  
TMT Jabatan 12 Agt 2022



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**

#### D. SUMBER DAYA

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

##### 1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 140 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 91 orang dan pegawai PPPK 15 orang dan 34 orang pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak, untuk melihat kompetensi yang dimiliki, diklasifikasikan kedalam jenjang Pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar	1 orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 orang	
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20 orang	
4	Diploma Satu (D-1)	-	
5	Diploma Tiga (D-3)	8 orang	
6	Diploma Empat (D-4)	6 orang	
7	Sarjana (S-1)	34 orang	
8	Sarjana (S-2)	20 orang	
9	PPPK	15 Orang	
10	Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak	34 Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>140 orang</b>	

Dari jumlah PNS sebanyak 103 orang, berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	II/a Pengatur Muda	0	1	1	
2	II/b Pengatur Muda Tk. I	1	0	1	
3	II/c Pengatur	1	2	3	
4	II/d Pengatur Tk. I	1	0	1	
5	III/a Penata Muda	10	9	19	
6	III/b Penata Muda Tk.I	11	10	21	
7	III/c Penata	2	7	9	
8	III/d Penata Tk. I	11	10	21	
9	IV/a Pembina	2	5	7	
10	IV/b Pembina Tk. I	2	5	7	
11	IV/c Pembina Utama Muda	1	0	1	
12	IV/d Pembina Utama Madya	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	

Keterangan: \*)

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	3	4	7
4	Fungsional khusus (JFT )	16	19	35
	Analisis Kebijakan	1	-	1
	Dokter	1	-	1
	Perawat	1	2	3
	Psikolog Klinis	3	2	5
	Penyuluh Sosial Murni	2	2	4
	Penyuluh Sosial Penyetaraan	1	2	3
	Pekerja Sosial	5	12	17
	Pekerja Sosial Penyetaraan	1	2	3
	Pranata Komputer	1	-	1
	Instruktur Terampil	1	-	1
	Perencana	-	1	1
5	Fungsional Umum	19	20	39
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>89</b>

## 2) Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

### a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya

yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	136	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	677	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	632	Orang
4	Penyuluh Sosial Masyarakat	25	Orang
5	SDM Program Keluarga Harapan (PKH)	224	Orang
6	Pelopor Perdamaian	80	Orang
7	Pendamping Sosial	24	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.796</b>	<b>Orang</b>

b. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

No	Nama Kelembagaan	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial	98	LKS
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	14	Lembaga
3	Karang Taruna	803	KT
4	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	63	Lembaga
	<b>Jumlah</b>	<b>977</b>	

## E. LINGKUP STRATEGIS

### 1. Lingkungan Internal.

- a. Adanya struktur organisasi, Visi, Misi dan Strategi mampu memberikan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan dan siapa penanggungjawabnya.
- b. Sumber Daya Manusia  
Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun 2025 mempunyai Pegawai sebanyak 140 orang dengan kualitas pendidikan yang cukup baik yang terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 13 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 77 orang
- c. Pedoman pelaksanaan program yang dibuat oleh penanggung jawab program/kegiatan dapat membantu para pelaksana kegiatan di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian kegiatan sesuai waktu, mutu dan sasaran.
- d. Dukungan dana APBD.
- e. Suasana kerja cukup kondusif.

### 2. Lingkungan Eksternal.

- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan penguatan bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan arah yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.
- c. Terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 111/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan

Sosial akan memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

- d. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
- e. Dukungan infrastruktur partisipasi masyarakat seperti PSM, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), relawan sosial, tokoh masyarakat maupun lembaga masyarakat.
- f. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana Dinas Sosial harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 perubahan kedua atas peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 37 tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pemerintah Daerah, maka Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Sosial selama 2025-2030. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah visi adalah :

**"Mengangkat Harkat Martabat Dayak Khususnya, umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045"**

Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Sosial mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2030 khususnya pada misi kelima (5) yaitu : "Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045" maka Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Visi yang

kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Visi yang disepakati oleh seluruh staf Dinas Sosial dan *stakeholders* telah mengacu pada visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, visi dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Secara terperinci, penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun tidak semua golongan masyarakat mampu mencapai kondisi sejahtera. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kelompok ini kemudian dikelompokkan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk membantu mereka mencapai kondisi sejahtera, diperlukan keterlibatan pihak lain yang secara terus menerus mendampingi mereka sampai mereka mempunyai kemampuan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan lebih berorientasi

kepada hal-hal yang bersifat stimulan. Hal ini untuk menghilangkan ketergantungan mereka terhadap pihak lain.

Berdasarkan faktor penyebab, program yang diberikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi PPKS, disesuaikan dengan kondisi permasalahan sasaran yang kemudian dikelompokkan menjadi program yang bersifat pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan ditujukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

## 2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai beberapa keterbatasan diantara kemampuan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga jangkauan pelayanan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut.

Salah satu pihak yang paling mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan adalah masyarakat sekitar sasaran, baik secara individu maupun lembaga-lembaga sosial yang terbentuk secara sukarela dan bertujuan memberi pelayanan sosial.

Pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.

Keberadaan generasi muda dalam suatu negara, merupakan hal yang sangat strategis. Keberlangsungan suatu negara pada masa datang akan sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam mengelolanya. Negara akan terus berkembang dan maju, apabila generasi muda mempunyai kemampuan dan perilaku yang baik. Dan sebaliknya keberadaan negara akan bermasalah apabila generasi mudanya tidak mempunyai kepedulian yang tinggi dan tidak mampu menghormati apa yang telah diraih oleh para pendahulunya.

Globalisasi yang terjadi, sangat berpengaruh terhadap perilaku generasi muda saat ini. Banyak terjadi pergeseran yang mengarah kepada perilaku negatif. Hal-hal yang dulu dianggap tabu, kini secara perlahan telah berubah. Keberadaban yang dimiliki bangsa Indonesia, perlahan menjadi hilang di ganti dengan budaya-budaya baru yang diadopsi dari negara lain.

Kondisi-kondisi diatas, apabila tidak ditangani secara dini akan menyebabkan hilangnya jati diri bangsa Indonesia yang sangat luhur. Kepedulian sosial akan luntur. Generasi muda tidak lagi merasa sebagai bagian dari pemegang amanah yang harus siap dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan negaranya. Mereka menjadi generasi apatis yang tidak peduli kepada lingkungan sekitar dan bersifat individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri di banding dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, pemerintah harus memfasilitasi harapan dan meneruskan cita-cita pahlawan dalam memelihara budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu upaya adalah mengingatkan generasi muda tentang cita-cita pahlawan melalui

kegiatan yang bersifat edukasi dan membangun kekuatan kebangsaan, melibatkan dalam kegiatan sosial, dan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kesetiakawanan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memotivasi secara lebih efektif terhadap penghargaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Sosial. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2030. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

### **1. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang inklusif, dan dijabarkan sesuai dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya, dengan tujuan sebagai berikut:

- Melakukan pelayanan perlindungan , jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS
    - a) Melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial;
    - b) Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat;
    - c) Melakukan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas didalam panti, terlantar, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, serta rehabilitasi sosial dasar, tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di dalam panti sosial.
  - Melakukan perlindungan sosial bagi korban bencana.  
Melakukan penyaluran bantuan sosial dan dukungan psikososial untuk korban bencana alam dan sosial yang menjadi kewenangan provinsi.
- b. Meningkatkan peran serta partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;  
Memberikan pelatihan pengembangan kapasitas PSKS.

## 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Renstra periode 2025-2030 sebagai berikut:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya, dengan tujuan sebagai berikut:

- Melakukan pelayanan perlindungan , jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS
  - a) Melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial;
  - b) Memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat;
  - c) Melakukan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas didalam panti, terlantar, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, serta rehabilitasi sosial dasar, tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di dalam panti sosial.
- Melakukan perlindungan sosial bagi korban bencana.  
Melakukan penyaluran bantuan sosial dan dukungan psikososial untuk korban bencana alam dan sosial yang menjadi kewenangan provinsi.
- b. Meningkatkan peran serta partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
  - Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;  
Memberikan pelatihan pengembangan kapasitas PSKS.

### C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang meningkat keberfungsian sosialnya	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di dalam panti	Orang
		Persentase Korban bencana Alam, sosial dan/ atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Orang

2.	Meningkatnya peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di dalam panti, rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Orang
		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Orang

#### D. PENETAPAN KINERJA 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan program/kegiatan penanganan permasalahan sosial, kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Indikator Kinerja dan Program Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
1	Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang meningkatkan keberfungsian sosialnya	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	20 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Rp. 1.075.790.000
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	40 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Rp. 1.586.460.968
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Rp. 1.262.979.636

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota	100 Orang	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	Rp. 175.211.005
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	3 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis terlantar dalam panti	Rp. 308.530.000
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10 Orang	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	Rp. 826.367.914
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	4000 Orang	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 937.443.858
2	Meningkatnya peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	Klg	KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	Rp. 33.584.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
	n sosial	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 25.000.000
		Jumlah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	orang	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 1.775.619.542
		Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 TMP	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp1.299.999.999,80

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 2 sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2025. Untuk mencapai 2 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 7 Program 19 kegiatan dan 98 Sub Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran belanja dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 40.764.265.004 (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Rupiah) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 35.678.611.562.70 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima ratus Enam Puluh dua tujuh puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 87,52 % dan realisasi fisik 90%.

Terjadi fluktuasi anggaran bersumber dana APBD. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan maupun penurunan anggaran sebagaimana sebagai tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD  
Periode Tahun 2021 – 2025



Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini sesuai dengan perubahan sasaran kegiatan ada setiap tahun berjalan. Tidak ada penurunan drastis terjadi pada tahun 2025. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja program yang mencapai realisasi fisik 100% khususnya dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan.

Beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian target, adalah terdapat penyesuaian anggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara ini tahapan dalam melakukan anggaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat beberapa sasaran yang mengalami perubahan jumlah sasaran khususnya berkaitan dengan terjadinya penambahan anggaran Tahun 2025. Capaian kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja

APBD								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2025			Ket
			2023	2024	Target	Realisasi	(%) Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkatkan keberfungsian sosialnya	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	40 Org	40 Org	40 Orang	40 Orang	100%	Tetap
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	80 Org	80 Org	80 Orang	80 Orang	100%	Tetap
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	65 Org	50 Org	50 Orang	50 Orang	100%	Tetap
		Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	40 Org	40 Org	40 Orang	40Orang	100%	Tetap

		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	Tetap
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tetap
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	4.140 Org	1000 Org	1000 Orang	1000 Orang	100%	Turun
2	Meningkatnya peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	100%	Tetap
		Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	100 Org	100 Org	100 Orang	100 Orang	100%	Tetap
		Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	100%	Tetap
		Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	100 Org	100 Org	100 Orang	100 Orang	100%	Tetap
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.320 Org	100.320 Org	350 Orang	350 Orang	100%	Turun

		Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100%	Tetap
--	--	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------

## B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2025 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Dari enam indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya *benefits* maupun *impacts* beberapa kegiatan pada Tahun 2025.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2025 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

### 1. Pengukuran Kinerja

#### a) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$  : Berhasil

$55 \leq X < 70$  : Cukup Berhasil

$X < 55$  : Tidak Berhasil

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori X Mean Kategorinya}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$

b) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai meknisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran dalam tataran output (keluaran) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Skala Pengukuran Ordinal			
		Sangat Berhasil (85 s.d. 100)	Berhasil ( $\leq 70X$ <85)	Cukup Berhasil ( $55 \leq X <$ 70)	Tidak Berhasil ( $X < 55$ )
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya	100			
2	Meningkatnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100			

Dari 6 (enam) sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

•	Sangat Berhasil	5	100 %
•	Berhasil	-	-
•	Cukup Berhasil	-	-
•	Tidak Berhasil	-	-
	Jumlah	6	100%

### C) Uraian Capaian Kinerja

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya dapat dilihat pada tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja.

Tabel 3.4  
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	40 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	Terpenuhi
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	50 Orang	60 Orang	60 Orang	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100 %	Terpenuhi

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %	Terpenuhi

Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dapat dilihat pada realisasi capaian kinerja dibawah ini :

Program rehabilitasi sosial disabilitas terlantar di dalam panti. Secara alur kerja sasaran program ini merupakan eks penghuni rumah sakit jiwa yang dikuatkan keberfungsian sosial melalui pembinaan dalam panti. Untuk tahap awal jumlah yang mampu ditangani sebanyak 40 orang di tahun 2025 dimana sama dengan tahun sebelumnya yang ditangani pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum. Sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh Dinas Sosial maka jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pengembangan yang terintegrasi antara fisik dan pengelolaan pelayanan termasuk penguatan dalam bidang sumber daya manusia.

Dalam program pembinaan anak terlantar di dalam panti dimana jumlah Anak terlantar yang mengikuti pengembangan bakat dan keterampilan dimana ada penambahan untuk target yang semula 40 orang menjadi 60 orang dengan realisasi mencapai sekitar 100% capaian kinerja.

Secara berkala seyogianya pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dampingan untuk kegiatan ini, mengingat keberlanjutan program menjadi kewenangan kabupaten/kota termasuk pemberian bantuan stimulan pasca diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial Provinsi.

Program Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" Palangka Raya ada penambahan sedikit yang semula sebanyak 50 (lima puluh) orang menjadi 60 orang, pelayanan yang di berikan berupa pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti jompo selama satu tahun. Program ini bersifat tetap dengan jumlah target yang bisa berubah kapan saja tergantung dari banyaknya klien yang ada panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang untuk setiap tahun anggaran selama 5 tahun sesuai dengan dokumen perencanaan menengah. Dalam tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pelayanan pada panti jompo, mengalami penurunan dari banyaknya penghuni panti yang awalnya 80 orang menjadi 60 orang hal ini dikarena banyaknya penghuni panti yang meninggal dunia.

Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis Terlantar dilaksanakan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah klien 10 orang bentuk pelayanannya berupa pemberian permakanan, pemberian sandang, bimbingan fisik, bimbingan spiritual dan bimbingan keterampilan.

Program Rehabilitas Sosial bagi Penyandang bagi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah siswa masih sama seperti tahun sebelumnya dengan jumlah 40 (sepuluh) dengan 2 angkatan.

### 3.1 Realisasi Outcomes

Sasaran ini merupakan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan kembali orang atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar bisa teratasi masalahnya yang meliputi; pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sosialnya.

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR),
- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW),
- Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia pada Panti Sosial Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkap" (PSTW)
- Pelayanan sosial bagi penderita eks psikotik ( gangguan jiwa) pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum (PSBL).

Secara umum, kegiatan dalam kelompok sasaran ini, selain memberikan penanganan rehabilitasi kepada klien, juga diciptakan hal-hal yang bersifat preventif seperti sosialisasi bagi remaja tentang penyalahgunaan Napza, atau sosialisasi bahaya HIV/AIDS di lokalisasi. Sementara untuk menciptakan keberfungsian sosial kelayan, dilaksanakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan lingkungan mereka diantaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan stimulan.

Program-program yang dilaksanakan dalam menangani sasaran ini adalah meningkatkan keberfungsian sosial PPKS dalam kategori pemulihan baik secara mental, sosial dan ekonomi. Sementara bagi Penyandang Masalah yang dianggap masih mampu melakukan mobilitas fisik secara mandiri, bantuan yang diberikan berupa stimulan usaha ekonomis produktif yang bertujuan menguatkan mereka dalam sisi ekonomi sehingga bisa lebih mandiri dan tidak membebani keluarganya.



Gambar 3.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Di dalam Panti

Meningkatkan Pelayanan Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal realisasi capaian kinerja.

Dalam sasaran ini kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemulangan orang terlantar ke provinsi terdekat. Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana.

### 3.2 Realisasi Outcomes

Program ini dilaksanakan dalam sasaran ini diantaranya adalah memfasilitasi pemulang warga migran terlantar ke provinsi terdekat dalam upaya melindungi Warga negara tindak kekerasan dalam hal ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.



Gambar 3.2 Penanganan Warga Migran Terlantar

Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan Indikator kinerja ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

### 3.3 Realisasi *Outcomes* (Manfaat)

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di Kaimantan Tengah seperti pelaksanaan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana juga harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan yang terencana.



Gambar 3.3 Asistensi Penerima Bantuan

Jumlah korban bencana alam dan sosial untuk Penanganan bagi Korban Bencana alam dan sosial, Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

### 3.4 Realisasi *Outcomes* (Manfaat)

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program nasional yang dilaksanakan di Kaimantan Tengah seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penanganan Stunting. Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga

anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan terencana.



Gambar 3.4 Penyaluran Bantuan

2. Meningkatnya peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja.

Tabel 3.5  
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial	250 Org	250 Org	250 Org	100 %	Terpenuhi
		Jumlah pengelolaan data Fakir Miskin Lintas Daerah kabupaten/Kota	10 Org	10 Org	10 Org	100 %	Terpenuhi
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2350 Org	2350 Org	2350 Org	100 %	Terpenuhi

	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100 %	Terpenuhi
--	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-----------

Kelembagaan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di masyarakat karena kelembagaan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kesadaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan dasar ini, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan menyediakan saluran agar kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dapat berjalan dengan baik dan sinergis dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah.

Pada Tahun 2025 pemberdayaan kelembagaan sosial dilaksanakan secara menyeluruh baik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personalnya maupun kepada organisasi yang mewadahnya. Hal ini dianggap akan lebih efektif karena sehingga keberadaan kelembagaan sosial di masyarakat akan lebih dirasakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

### 3.5 Realisasi Outcomes

Dalam penanganan permasalahan sosial, selain bekerja sama dengan aparat pemerintah, Dinas Sosial juga mempunyai mitra kerja di masyarakat yang tergabung dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Peran mereka sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program karena stakeholder ini mempunyai keterkaitan yang erat dalam sistem lingkungan penyandang masalah, baik secara fisik maupun emosional. Potensi dan sumber tersebut adalah Organisasi Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepedulian Sosial Dunia Usaha (CSR). Program yang diprioritaskan bagi mereka adalah pengembangan kapasitas sehingga secara profesional mereka dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan pada sasaran ini diantaranya adalah :

- Partisipasi masyarakat secara umum yang meningkat dalam pelayanan-pelayanan sosial ditandai dengan keterlibatan dalam program yang dilaksanakan baik secara individu maupun masyarakat sebagai komunitas.
- Kegiatan pembentukan forum CSR telah memberikan informasi yang jelas bagi perusahaan tentang kewajiban perusahaan dalam keterlibatan mereka dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.
- Meningkatnya partisipasi lembaga-lembaga sosial swasta (LKS) dengan memperbaiki pelayanan yang dilaksanakan sebagai hasil dari penguatan kapasitas.
- Mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta meningkatkan sinergi dan koordinasi TKSK dengan lintas sektor.



Gambar 3.5 Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan atau Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang ada di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Hal tersebut dikarenakan TMP sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dan selalu terjaga kebersihannya dengan baik.



Gambar 3.6 Masyarakat yang menanam nilai- nilai Kepahlawanan

### C. ASPEK KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Pagu anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 40.764.265.004 (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Rupiah) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 35.678.611.562.70 ( Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Tujuh Puluh Rupiah) dengan realisasi keuangan 87,52% realisasi fisik sebesar 90%.

Secara terperinci, penggunaan dana untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	403.031.160	339.514.200	84,24
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan	129.200.000	126.186.230	97,67
3.	Program Rehabilitasi Sosial	5.060.128.518	4.445.004.163	90,00
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.857.243.542	330.640.487	17,80
5.	Program Penanganan Bencana	937.443.858	931.739.029	100
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.299.999.999,80	1.228.426.838,70	100

#### D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada Tahun Anggaran 2025 masih terdapat permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya akurat *By Name By Address* (BNBA), di setiap wilayah kabupaten mengingat tidak ada struktur dan Lembaga yang khusus menangani bidang data sosial di tiap kabupaten, sehingga ketepatan sasaran belum maksimal.
2. Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang jumlah dananya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
3. Mutasi jabatan yang cukup singkat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan kesinambungan program menjadi terganggu karena pengalihan jabatan tidak diimbangi dengan pelimpahan tugas dan pekerjaan, juga adanya perbedaan nomenklatur yang juga merupakan suatu permasalahan di Kabupaten/Kota.
4. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi dalam melakukan kegiatan di Kabupaten/Kota memerlukan proses koordinasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan terpuncak pada akhir Tahun Anggaran.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan sehingga target sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria PPKS yang telah ditentukan dan menghindari terjadinya salah sasaran program.

2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah agar terus mengupayakan kenaikan APBD bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengusulkan dana sharing dalam program APBD untuk memaksimalkan program/kegiatan, sehingga hasil kegiatan menjadi lebih maksimal.
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada Tahun 2025 sehingga permasalahan yang sama dapat diantisipasi pada masa mendatang.

## B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat realisasi anggaran tahun 2025 yang telah dicapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan			Ket
				Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.06.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi</b>			<b>31.077.217.926</b>		<b>28.217.100.615</b>	<b>95,00</b>	
<b>1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran &amp; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			136.110.000		123.679.452	90,87	
1	1.06.01.1.01.001	Penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah	18.400.000		17.957.750	100,00	
2	1.06.01.1.01.006	Koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi SKPD	15.210.000		12.624.950	100,00	
3	1.06.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja SKPD	102.500.000		93.096.752	100,00	
<b>1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>			<b>15.974.856,304</b>		<b>14.542.292.470</b>	<b>100,00</b>	
1	1.06.01.1.02.001	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	15.524.216.304		14.197.907.470	100,00	
2	1.06.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas	450.640.000		344.385.000	85,00	

		ASN			
<b>1.06.01.1.03 Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah</b>			<b>79.558.000</b>	<b>68.481.898</b>	<b>100,00</b>
1	1.06.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	20.000.000	14.968.898	85,00
2	1.06.01.1.03.003	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	59.558.000	53.513.000	100,00
<b>1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</b>			<b>487.951.363</b>	<b>329.285.600</b>	<b>75,00</b>
1	1.06.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	205.000.000	147.618.000	80,00
2	1.06.01.1.05.009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	128.806.009	52.398.600	50,00
3	1.06.01.1.05.010	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	154.145.354	129.269.000	100,00
<b>1.06.01.1.06 Administrasi Umum pemerintah daerah</b>			<b>801.672.559</b>	<b>519.445.411</b>	<b>75,00</b>
1	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	200.000.000	79.904.000	50,00
2	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan peralatan & Perlengkapan kantor	80.667.559	64.038.300	85,00
3	1.06.01.1.06.0005	Pengadaan Barang cetakan & Penggandaan	85.000.000	72.443.000	100,00
4	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	165.000.000	89.959.000	70,00
5	1.06.01.1.06.0008	Fasilitas kunjungan tamu	15.005.000	14.910.000	100,00
6	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	256.000.000	198.391.111	85,00
<b>1.06.01.1.07 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah</b>			<b>3.844.897.654</b>	<b>3.676.240.155</b>	<b>100,00</b>

1	1.06.01.1.07.002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	512.000.000		505.404.400	100,00	
2	1.06.01.1.07.005	Pengadaan mebel	47.700.000		47.100.000	100,00	
3	1.06.01.1.07.006	Pengadaan peralatan mesin lainnya	65.483.329		37.800.000	70,00	
4	1.06.01.1.07.009	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	3.000.000.000		2.946.741.755	100,00	
5	1.06.01.1.07.010	Pengadaan sarana & prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	219.714.325		139.194.000	70,00	
<b>1.06.01.1.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>2.692.222.046,20</b>		<b>2370.932.253</b>	<b>100,00</b>	
1	1.06.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000		18.000.000	100,00	
2	1.06.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	523.578.196		423.460.547	100,00	
3	1.06.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.150.643.850,20		1.929.471.706	100,00	
<b>1.06.01.1.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah</b>			<b>7.059.950.000</b>		<b>6.586.743.376</b>	<b>100,00</b>	
1	1.06.01.1.09.002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perijinan kendaraan dinas operasional lapangan	410.000.000		334.286.745	100,00	
2	1.06.01.1.09.009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor & bangunan lainnya	6.550.000.000		6.163.075.031	100,00	
3	1.06.01.1.09.010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	99.950.000		89.381.600	100,00	
<b>1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial</b>			<b>403.031.160</b>		<b>339.514.200</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.06.01.1.01 Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>			<b>16.890.100</b>		<b>9.540.000</b>	<b>100,00</b>	

1	1.06.02.1.01	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	16.890.100		9.540.000	100,00	
<b>1.06.02.1.01.01 Pemberdayaan Sosial potensi sumber</b>			<b>386.141.060</b>		<b>329.974.200</b>	<b>90,00</b>	
1	1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	56.912.260		33.620.000	65,00	
2	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	82.670.000		57.854.000	75,00	
3	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	246.558,800		238.500.200	100,00	
<b>1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>			<b>129.200.000</b>		<b>126.186.230</b>	<b>100,00</b>	
1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			129.200.000		126.186.230	100,00	
1	1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	129.200.000		126.186.230	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial</b>			<b>5.060.128.518</b>		<b>4.445.004.163</b>	<b>90,00</b>	
1	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1.075.790.000		1.297.600.433	100,00	
2	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	1.586.460.968		1.398.456.817	90,00	
3	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	1.262.979.636		1.045.153.084	90,00	
4	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	308.530.000		269.508.550	90,00	
5	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	826.367.914		794.451.931	100,00	
<b>1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			<b>1.857.243.542</b>		<b>330.640.487</b>	<b>50,00</b>	
<b>1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal</b>			<b>23.040.000</b>		<b>19.709.000</b>	<b>90,00</b>	
1	1.06.05.1.01.001	Pengangkatan Anak antar WNI	23.040.000		19.709.000	90,00	
<b>1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah provinsi</b>			<b>1.834.203.542</b>		<b>330.640.487</b>	<b>50,00</b>	
1	1.06.05.1.02.001	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	33.584.000		29.934.787	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.06.05.1.02.0 002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		23.590.000	100,0 0	
2	1.06.05.1.02.0 3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.775.619.542		257.406.700	50,00	
<b>1.06.06 Program Penanganan Bencana</b>			<b>937.443.858</b>		<b>937.739.029</b>	<b>100,0 0</b>	
1	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	937.443.858		937.739.029	100,0 0	
<b>1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>			<b>1.229.999.999,8 0</b>		<b>1.229.999.999,80</b>	<b>100,0 0</b>	
13	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.229.999.999,8 0		1.229.999.999,80	100,0 0	

## BAB IV PENUTUP

### A. PENUTUP

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah mampu melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa kendala yang terjadi dapat diatasi dengan baik sehingga realisasi keuangan dan realisasi kegiatan cukup baik.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2026 adalah penyempurnaan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang belum sempurna. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan yang mengganggu kinerja program. Kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat ditingkatkan dengan berkaca pada Laporan Kinerja ini.

### B. SARAN

Memperhatikan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana yang telah tercermin pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan peningkatan yaitu :

1. Diperlukan penambahan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas seperti penanggulangan kemiskinan. Bila dicermati kondisi saat ini, antara besaran dana daerah masih relatif perlu penambahan, Sehingga hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program/kegiatan pada jangka panjang.
2. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergitas program. Dengan demikian kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kesatuan perencanaan yang terpadu dan saling mendukung. Program-program yang diluncurkan pusat dapat diteruskan secara tepat sasaran oleh pemerintah daerah dan memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat Kalimantan Tengah.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Palangka Raya, Januari 2026

**Kepala Dinas,**



**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 200312 1 004

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS SOSIAL

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp. (0536) 3221582, Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan tangan di bawah ini :

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**  
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
Pembina Utama Muda (IV/c)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp. (0536) 3221582, Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta berubah perilaku sosialnya.	%	90
2.	Meningkatnya kemampuan, partisipasi dan peran serta Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan, partisipasi dan peran serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	%	80
3.	Tersalurkannya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	100

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Stategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Program	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Rp 23.372.673.116	
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp 826.580.100	
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 129.200.000	
4. Program Rehabilitasi Sosial	Rp 5.248.143.968	
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.777.151.300	
6. Program Penanganan Bencana	Rp 2.127.903.646,52	
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 466.088.000	

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

EDDY KARUSMAN, ST., MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111  
☎ (0536) 3221582 Fax 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OVI LUTHFIA FAIZAL S.Hut., MS.  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama.**

Nama : EDDY KARUSMAN, ST., M.T.  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua

  
**EDDY KARUSMAN, ST., M.T.**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Pihak Pertama

  
**OVI LUTHFIA FAIZAL, S.Hut., MS**  
NIP. 19690410 199603 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jln Mayjend D I Panjaitan No 12 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111  
☎ (0536) 3221582 Fax 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1
2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi: Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	Lembaga	1
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang meningkat kapasitasnya	Orang	138
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	30
5	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	1
6	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	1
7	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 19 130 100 -	
2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Pekerja Sosial Masyarakat)	Rp 199 450 000 -	
3 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	Rp 196 700 000 -	
4 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Kelembagaan Masyarakat)	Rp 411 300 000 -	
5 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 220 000 000 -	
6 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.000 000 000 -	
7 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 80 000 000 -	

Pihak Kedua

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T.**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama

**OVI LUTHFIA FAIZAL, S.Hut., MS.**  
NIP. 19690410 199603 1 006



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jalan Mayjend D I Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 241185  
PALANGKA RAYA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **NORLIANA, A.Md**

Jabatan **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA**

Jabatan **Pt SEKRETARIS DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA**  
NIP. 1968021 199803 2 004

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Pertama,

**NORLIANA, A.Md**  
NIP. 19721110 199203 2 009



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jalan Mayjend D I Panjatan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 241185  
PALANGKA RAYA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tertaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	92
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertaksananya Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	Orang	17
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertaksananya Asuransi Gedung selama 1 Tahun	Unit	8
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Sensus Barang Milik Daerah	Tanah	6
			Gedung	125
			Peralatan dan Mesin	2594

### Sub Kegiatan

### Anggaran

### Keterangan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	16 013 172 490 .
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	450 640 000 .
3. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	20 000 000 .
4. Penatausahaan Barng Milik Daerah	Rp	70 000 000 .


Pihak Kedua

  
Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA  
NIP. 1968021 199803 2 004

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Pertama

  
NORLIANA, A.Md  
NIP. 19721110 199203 2 009



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjen D I Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp (0536) 3221582, Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **UMIASIH, SE**

Jabatan **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA**

Jabatan **: Pjt SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA**  
NIP. 196802131998032004

Pihak Pertama,

**UMIASIH, SE**  
NIP. 197101051991032008



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjen D I Panjatan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
		Jumlah laporan penatausahaan Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	145
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	100
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Org	20
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	50
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 20.000.000	
2	Penatausahaan Milik Daerah pada SKPD	Rp 70.000.000	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Rp 205.000.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 373.950.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 150.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp 165.000.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 15.005.000	
8	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Rp 350.000.000	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 18.000.000	
10	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 750.000.000	

Palangka Raya      Januari 2025

Pihak Kedua,

  
**Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA**  
 NIP. 196802131998032004

Pihak Pertama,

  
**UMIASIH, SE**  
 NIP. 197101051991032008



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjen D I. Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **SUGENG KASPANI, S.Pi., M.T**  
Jabatan **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama **EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
Jabatan **KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua

  
**EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Pihak Pertama

  
**SUGENG KASPANI, S.Pi., M.T**  
NIP. 19680816 1989031 013



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jalan Mayjen D I Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111  
Telp. (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BIDANG PENANGAN FAKIR MISKIN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin	Presentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		50

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Rp 2.752.751.300	

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua

**EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Pihak Pertama

**SUGENG KASPANI, S.Pi., M.T**  
NIP. 19680816 1989031 013



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jalan Mayjend D I Panjaitan No 12 (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185  
Palangka Raya

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Jabatan **KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **EDDY KARUSMAN, ST., M.T**

Jabatan **KEPALA DINAS SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Palangka Raya

Januari 2025

Pihak Pertama,



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jalan Mayjend D I Panjaitan No 12 (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185  
Palangka Raya

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Sosial	Orang	Persentase korban bencana yang tertangani
2	Meningkatnya Peran serta PSKS dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya dalam menangani masalah kesejahteraan	Orang	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.247.000.000	
2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp.150.000.000	
3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp.150.000.000	
4. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp.100.000.000	
5. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp1.480.903.646,52	

Pihak Kedua

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Palangka Raya,  
Pihak Pertama

Januari 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jln Mayjend D I Panjatan No. 12 Teip (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir FIRTA MARIA DESE, MBA

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDDY KARUSMAN, ST.,MT

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,

**Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA**  
NIP. 196802131998032004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jln Mayjend D I Panjatan No 12 Telp (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	1
2	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asalnya	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asalnya	Dokumen	1
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Pant	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Pant	Dokumen	1
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Pant	Jumlah dokumen Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Pant	Dokumen	1
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Dokumen	1
6	Pengangkatan Antar Anak WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah dokumen Pengangkatan Antar Anak WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Dokumen	1

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	RP 198 083 000,-	
2	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asalnya	RP 123 940 000 -	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Pant	RP 48 550 000,-	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Pant	RP 75 000 000,-	
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	RP 90 000 000,-	
6	Pengangkatan Antar Anak WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	RP 50.000 000,-	

Pihak Kedua



**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Palangka Raya, Januari 2025  
Pihak Pertama



**Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA**  
NIP. 196802131998032004



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjen D I Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST.,MT**

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
**EDDY KARUSMAN, ST.,MT**  
NIP. 197702072003121004



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjen D.I Panjatan Nomor 12 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111  
Telp (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DINAS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaran dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	143
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Org	20
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	157
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	50
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mabel yang disediakan	Paket	20
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	19

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	164
		Jumlah Orang yang Teraskes Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50
		Jumlah Orang yang Teraskes Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	0
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Unit	136
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Dokumen	5
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoOrdinasi Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	157
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15
		Jumlah Paket Brang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinan	unit	31
13	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	97
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Asuransi Gedung selama 1 Tahun	Gedung	9
15	Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya sensus Barang Milik Daerah	Tanah Gedung Peralatan Mesin	6 125 2594

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 18.400.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.210.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 205.000.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16.013.172.490	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 450.640.000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 20.000.000	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 70.000.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 205.000.000	
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 150.000.000	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 373.950.000	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp 200.000.000	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 350.000.000	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 850.000.000	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 165.000.000	
15	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 15.005.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 365.000.000	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 35.000.000	
18	Pengadaan Mebel	Rp. 449.360.000	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 330.000.000	
20	Pengadaan Gedung Bangunan Lainnya	Rp. 3.000.000.000	
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.050.000.000	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 18.000.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 750.000.000	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.718.066.800	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 360.000.000	
26	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 7.700.000.000	
27	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 100.000.000	

Palangka Raya, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
**EDDY KARUSMAN, ST..MT**  
 NIP. 197702072003121004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM

Jl. Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu 73224

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **drg. SARITA ARITONANG**

Jabatan Kepala UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Pertama

**drg. SARITA ARITONANG**

NIP. 19690619 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM

Jl. Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu 73224

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI PROGRAM DAN ADVOKASI

NO.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pelaksanaan pengelolaan data/informasi mutakhir dan berkelanjutan	a. Jumlah dokumen perencanaan PSBL Pabelum (Renja RKA dan KAK)	Dokumen	3
2	Meningkatnya pemahaman sector/lintas keluarga masyarakat penanganannya bagi penyandang distabilitas mental eks psikotik	b Data/informasi Profil Pabelum Tahun 2025	Dokumen	1
3	Meningkatnya pencatatan dan pelaporan transparansi dan akuntabel	Jumlah wilayah kabupaten/kota yang mendapat informasi tentang pelayanan dan rehabilitas sosial penyandang distabilitas mental eks psikotik	Kab/Kota	3
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan panti (Laporan semesteran dan laporan tahunan UPT PSBL Pabelum)	Dokumen	2

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Permakanan	576 391 616	
2 Penyediaan Sandang	90 000 000	
3 Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40 000 000	
4 Pembenan Bimbingan Fisik, Mental, Spntual	18 980 952	
5 Pembenan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehan-hari	28 999 145	
6 Pembenan Pelayanan Penelusuran Keluarga	30 000 000	
7 Pembenan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30 000 000	

Banturung      Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

drg. SARITA ARITONANG  
NIP 19690619 199803 2 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DINAS SOSIAL**

**PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM**

**Jl. Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu 73224**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama **ENDANG YULIANTIE, SE**

Jabatan **Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **drg. SARITA ARITONANG**

Jabatan **Kepala UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

**drg. SARITA ARITONANG**  
NIP. 19690619 199803 2 005

Banturung, Januari 2025

Pihak Pertama.

**ENDANG YULIANTIE, SE**  
NIP. 19750725 200604 2 019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM

Jl. Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu 73224

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi	a. Terlaksananya pengelolaan surat menyurat dan arsip	Dokumen	12
		b. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen	12
		c. Terlaksananya pengelolaan kebersihan kantor	Dokumen	1
		d. Terlaksananya pengelolaan keamanan kantor	Dokumen	1
2	Meningkatnya Pemahaman lintas sektor, keluarga dan masyarakat dalam penanganan Penyandang Distabilitas Mental Eks Psikotik	Terlaksananya Pengelolaan barang/inventaris aset	Dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Kegiatan Permakanan	73.608.384	
1.1 Belanja Tabung Gas	23.208.384	
1.2 Honor Juru Masak	50.400.000	
2 Kegiatan Pembinaan Bimbingan Fisik, Mental, Sprtual dan Sosial	24.000.000	
2.1 Honor Rohaniawan	12.000.000	
2.2 Honor Instruktur	12.000.000	
3. Fasilitas Pembuat Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Distabilitas	1.500.000	
4 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	38.800.000	

Banturung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

drg. SARITA ARITONANG  
NIP. 19690619 199803 2 005

ENDANG YULIANTIE, SE  
NIP. 19750725 200604 2 019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM

Jl. Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu 73224

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Jabatan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama drg. SARITA ARITONANG

Jabatan Kepala UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banturung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**drg. SARITA ARITONANG**  
NIP. 19690619 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

PANTI SOSIAL BINA LARAS PABELUM

Jl. Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu 73224

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL

NO.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
a.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar	Tertindakannya program rehabilitasi sosial dengan 8 tahapan	Orang	1
b.	Terpenuhinya tahapan layanan Program Rehabilitasi Sosial yang komprehensif dan berkelanjutan	Tersusunnya jadwal kegiatan program rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik	Dokumen	1
c.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Tertindakannya monitoring dan evaluasi kegiatan bimbingan sosial psikososial, keterampilan fisik dan mental spiritual	Dokumen	1
d.	Meningkatnya pemahaman lintas sektor, keluarga dan masyarakat dalam penanganan Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik	Tersusunnya usulan program kerja kegiatan rehabilitasi sosial	Dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	28.318.000	.
2. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10.429.048	
3. Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehan-han	58.802.855	
4. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	37.360.000	

Banturung,            Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama



**drg. SARITA ARITONANG**  
NIP. 19690619 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp (0536) 3222152 Kode Pos 73112

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRA PURNAMA, S. IP**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ISMANIAH, SE**

Jabatan : **KEPALA PANTI UPT PANTI SOSIAL BINA REMAJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**ISMANIAH, SE**  
NIP. 197308191999022002

Palangka Raya,      Januan 2025

Pihak Pertama,

**HENDRA PURNAMA, S. IP**  
NIP. 197106091992031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No. 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp. (0536) 3222152 Kode Pos 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertantar di Dalam Panti	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Tertantar di Dalam Panti	Anak	80

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengasuhan	Rp. 117.000.000	2 Kali Angkatan
2. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp. 176.080.000	2 Kali Angkatan
3. Kegiatan Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses	Rp. 75.000.000	2 Kali Angkatan
4. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	Rp. 17.193.268	2 Kali Angkatan
5. Akses Kelayakan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Rp. 13.060.000	2 Kali Angkatan

Pihak Kedua,

**TSMANIAH, SE**  
NIP. 197308191999022002

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,

**HENDRA PURNAMA, S. IP**  
NIP. 197106091992031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp (0536) 3222152 Kode Pos 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI SUPRIATI**

Jabatan : **KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ISMANIAH, SE**

Jabatan : **KEPALA PANTI UPT PANTI SOSIAL BINA REMAJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**ISMANIAH, SE**  
NIP. 197308191999022002

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,

**SRI SUPRIATI**  
NIP. 196706041992032007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp. (0536) 3222152 Kode Pos 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertantar di Dalam Panti	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Tertantar di Dalam Panti	Anak	80
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertantar di Dalam Panti	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial di Dalam Panti	Anak	500

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp. 606.183.108	2 Kali Angkatan
2. Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 287.421.392	Bansos
3. Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Rp. 24.820.000	2 Kali Angkatan
	Rp. 82.144.200	2 Kali Angkatan

Pihak Kedua.

ISMANIAH, SE  
NIP. 197308191999022002

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama.

SRI SUPRIATI  
NIP. 196706041992032007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp (0536) 3222152 Kode Pos 73112

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISMANIAH, SE**

Jabatan : **KEPALA UPT PANTI SOSIAL BINA REMAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT.**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**EDDY KARUSMAN, ST., MT.**  
NIP. 197702072003121004

Palangka Raya,      Januari 2025

Pihak Pertama,

  
**ISMANIAH, SE**  
NIP. 197308191999022002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No. 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp. (0536) 3222152 Kode Pos 73112

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : KEPALA SEKSI PROGRAM DAN ADVOKASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISMANIAH, SE

Jabatan : KEPALA PANTI UPT PANTI SOSIAL BINA REMAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ISMANIAH, SE  
NIP. 197308191999022002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp (0536) 3222152 Kode Pos 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA UPT PANTI SOSIAL BINA REMAJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Tertaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	Anak	80
2.	Rehabilitasi Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Tertaksananya Pemberian Bantuan Sosial di Dalam Panti	Anak	500

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengasuhan	Rp. 117.000.000	2 Kali Angkatan
2. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp. 606.183.108	2 Kali Angkatan
	Rp. 287.421.392	Bansos
3. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp. 176.080.000	2 Kali Angkatan
4. Kegiatan Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses	Rp. 75.000.000	2 Kali Angkatan
5. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	Rp. 17.193.268	2 Kali Angkatan
6. Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Rp. 24.820.000	2 Kali Angkatan
7. Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Rp. 82.144.200	2 Kali Angkatan
8. Akses Kelayakan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Rp. 13.060.000	2 Kali Angkatan
9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 80.000.000	2 Kali Angkatan
10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 80.000.000	2 Kali Angkatan
11. Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Rp. 40.000.000	2 Kali Angkatan

Pihak Kedua,

EDDY KARUSMAN, ST., MT.  
NIP. 197702072003121004

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Pertama,

ISMANIAH, SE  
NIP. 197308191999022002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Jln Rajawali No 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp (0536) 3222152 Kode Pos 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI PROGRAM DAN ADVOKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	Anak	80

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 80.000.000	2 Kali Angkatan
2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 80.000.000	2 Kali Angkatan
3. Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Rp. 40.000.000	2 Kali Angkatan

Pihak Kedua,

**ISMANIAH, SE**  
NIP. 197308191999022002

Palangka Raya,

Pihak Pertama,

Januan 2025



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**

Jalan Rajawali No 123 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHMAN RASYID, SPd., MM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PANTI SOSIAL KARYA  
WANITA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARRUNG M. PASOLANG, SKM., M.Si

Jabatan : KEPALA UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA DINAS SOSIAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

**ARRUNG M. PASOLANG, SKM., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700127 199803 2 005

Pihak Pertama,

**SAHMAN RASYID, SPd., MM**  
NIP. 19690508 199103 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**

Jalan Rajawali No.123 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA  
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Wanita Rawan Sosial Ekonomi	orang	40
2	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis	orang	10

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS &amp; NAPZA di Dalam Panti</b>	<b>Rp. 670.000.000</b>	
1	Penyediaan Permakanan	Rp. 294.000.000.-	
2	Penyediaan Sandang	Rp. 36.000.000.-	
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp. 100.000.000.-	
4	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Rp. 145.000.000.-	
5	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 15.000.000.-	
6	Pemulangan ke Daerah Asal	Rp. 80.000.000.-	
<b>II</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti</b>	<b>Rp. 276.000.000</b>	
1	Penyediaan Permakanan	Rp. 55.000.000.-	
2	Penyediaan Sandang	Rp. 10.000.000.-	
3.	Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Rp. 5.000.000.-	

4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp. 50.000.000.-	
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp. 50.000.000.-	
6	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp. 50.000.000.-	
7	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Rp. 5.000.000.-	
8	Pemulangan ke Daerah Asal	Rp. 51.000.000.-	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 946.000.000</b>	

Pihak Kedua,



**ARRUNG M. PASOLANG, SKM., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700127 199803 2 005

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,



**SAHMAN RASYID, SPd., MM**  
NIP. 19690508 199103 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**

Jalan Rajawali No 123 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARRUNG M. PASOLANG, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**

**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 200312 1 004

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,

**ARRUNG M. PASOLANG, SKM., M.Si**  
NIP. 19700127 199803 2 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
Jalan Rajawali No 123 Palangka Raya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Wanita Rawan Sosial Ekonomi	orang	40
2	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis	orang	10

No.	Kegiatan	Anggaran
<b>I</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS &amp; NAPZA di Dalam Panti</b>	<b>Rp. 670.000.000.-</b>
1	Penyediaan Permakanan	Rp. 294.000.000.-
2	Penyediaan Sandang	Rp. 36.000.000.-
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp. 100.000.000.-
4	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehan-Hari	Rp. 145.000.000.-
5	Akses Kelayan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 15.000.000.-
6	Pemulangan ke Daerah Asal	Rp. 80.000.000.-
<b>II</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti</b>	<b>Rp. 276.000.000.-</b>
1	Penyediaan Permakanan	Rp. 55.000.000.-
2	Penyediaan Sandang	Rp. 10.000.000.-
3.	Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Rp. 5.000.000.-

4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp. 50.000.000.-
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp. 50.000.000.-
6	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp. 50.000.000.-
7.	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Rp. 5.000.000.-
8.	Pemulangan ke Daerah Asal	Rp. 51.000.000.-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 946.000.000</b>

Pihak Kedua.



**EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 200312 1 004

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama



**ARRUNG M. PASOLANG., SKM, M.Si**  
NIP. 19700127 199803 2 005



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jl. Mayjen D.I Panjaitan No 12, ☎ (0536)3224185 Palangka Raya

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEPTIANUS HANJUNG S Kep. Ns  
Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial Merangkap Plt. Kepala Panti  
UPT PSTW Sinta Rangkang Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah  
Selanjutnya Di sebut Pihak Pertama

Nama : EDDY KARUSMAN ST. MT  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap segala capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi.

Palangka raya, 14 Februari 2024

Pihak Kedua

EDDY KARUSMAN ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 200312 1004

Pihak Pertama

SEPTIANUS HANJUNG S. Kep. Ns  
Nip. 19750921 199803 1 003



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jl. Mayjen D.I. Panjatan No.12. - (0536)3224185 Palangka Raya

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	target
1	Terlaksanaan Kebutuhan Dasar berupa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Di dalam Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang	Ada dokumen kegiatan	laporan	50 org
2	Terpenuhi pelayanan Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Layanan perlindungan sosial Dalam Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang	Ada dokumen kegiatan	laporan	50 org

1	Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp 900 000 000 00
2	Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp 103 065 000 00
3	Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 60 000 000 00
4	Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp 5 000 000 00
5	Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Rp 36 000 000 00
6	Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp 24 000 000 00
7	Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 10 000 000 00
8	Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 5 320 000 00
9	Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 15 000 000 00
10	Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 24 000 000 00
11	Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 24 000 000 00
12	Kegiatan Pemulasaraan	Rp 74 000 000 00

Pihak Kedua

EDDY KARUSMAN ST MT  
Pembina Utama Muda  
NIP 19770207 200312 1004

Pihak Pertama

SEPTIANUS HANJUNG S Kep. Ns  
Nip 19760921 199803 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjen D.I Panjaitan N0.12. = (0536)3224185 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	target
1	Terselenggaranya Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Ada dokumen kegiatan	laporan	10 orang
2	Terselenggaranya Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Ada dokumen kegiatan	laporan	10 orang

Program /kegiatan

anggaran

keterangan

1. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga

Rp 24.000.000

2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga

Rp 24.000.000

Pihak Kedua

  
EDDY KARUSMAN ST.MT  
Pembina Utama Muda  
NIP 19770207 200312 1004

Pihak Pertama

  
SEPTIANUS PANJUNG.S.Kep.Ns  
Nip 19760921 199803 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 24185  
**PALANGKA RAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TINCE SALOH, SKM., M.M**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL**  
**UPT PSTW SINTA RANGKANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

  
**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Pihak Pertama,

  
**TINCE SALOH, SKM., M.M**  
NIP. 19710703 199503 2 017



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 24185  
**PALANGKA RAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terlaksananya Permakanan	Laporan	oh	50 orang
2.	Tersedianya Sandang	Laporan	oh	50 orang
3.	Tersedianya Alat Bantu	Laporan	oh	15 orang
4.	Tersedianya Perbekalaian Kesehatan di Panti Sosial	Laporan	oh	50 orang
5.	Tersedianya Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual	Laporan	oh	50 orang
6.	Terlaksananya Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Laporan	oh	50 orang
7.	Terlaksananya Pembuatan NIK bagi Lansia	Laporan	oh	10 orang
8.	Terlaksananya Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar	Laporan	oh	20 orang
9.	Tersedianya Pemulasaraan	Laporan	oh	8 orang
10.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Laporan	oh	10 orang
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Laporan	oh	10 orang
12.	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Laporan	oh	50 orang

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Rp. 1.275.565.000</b>	
1.	Terlaksananya Permakanan	Rp. 900.000.000	
2.	Tersedianya Sandang	Rp. 103.065.000	
3.	Tersedianya Alat Bantu	Rp. 9.000.000	
4.	Tersedianya Perbekalaian Kesehatan di Panti Sosial	Rp. 36.000.000	
5.	Tersedianya Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual	Rp. 24.000.000	
6.	Terlaksananya Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Rp. 10.000.000	
7.	Terlaksananya Pembuatan NIK bagi Lansia	Rp. 1.500.000	



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 24185  
**PALANGKA RAYA**

8.	Terlaksananya Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar	Rp.	10.000.000	
9.	Tersedianya Pemulasaraan	Rp.	74.000.000	
10.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Rp.	24.000.000	
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.	24.000.000	
12.	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Rp.	60.000.000	

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua.

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Pihak Pertama.

**TINCE SALOH, SKM., M.M**  
NIP. 19710703 199503 2 017



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 24185  
**PALANGKA RAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**  
**UPT PSTW SINTA RANGKANG.**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

  
**EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
NIP. 19770207 200312 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Mayjend D I. Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 24185  
**PALANGKA RAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan	12
2	Tersedianya Urusan Penunjang Perkantoran yang Sesuai Standar yang Berlaku.	Jumlah Dokumen Tersedianya Urusan Penunjang Perkantoran	Dokumen	12
3	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Pengolahan Data, Keprotokolan, Kehumasan, serta Pengelolaan Kebersihan yang Tertib dan Akurat Sesuai Aturan yang Berlaku.	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Pengolahan Data, Keprotokolan, serta Kehumasan	Dokumen	12
4	Tersedianya Pengelolaan Kebutuhan, Penyediaan, Perawatan, serta Pengamanan Aset Barang Milik Daerah yang Sesuai Standar yang Berlaku	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebutuhan, Penyediaan, Perawatan, serta Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Dokumen	12
5	Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan yang Sesuai Standar yang Berlaku.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.	Dokumen	12

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
NIP. 19770207 200312 1 004

Pihak Pertama,



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX ( 0536 ) 24185  
**PALANGKA RAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

KEPALA UPT PSTW SINTA RANGKANG.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**

Jabatan

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua.

Pihak Pertama.

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
NIP. 19770207 200312 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 24185  
**PALANGKA RAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terlaksananya Permakanan	Laporan	oh	50 orang
2.	Tersedianya Sandang	Laporan	oh	50 orang
3.	Tersedianya Alat Bantu	Laporan	oh	15 orang
4.	Tersedianya Perbekalan Kesehatan di Panti Sosial	Laporan	oh	50 orang
5.	Tersedianya Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual	Laporan	oh	50 orang
6.	Terlaksananya Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Laporan	oh	50 orang
7.	Terlaksananya Pembuatan NIK bagi Lansia	Laporan	oh	10 orang
8.	Terlaksananya Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar	Laporan	oh	20 orang
9.	Tersedianya Pemulasaraan	Laporan	oh	8 orang
10.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Laporan	oh	10 orang
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Laporan	oh	10 orang
12.	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Laporan	oh	50 orang

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Rp. 1.275.565.000</b>	
1.	Terlaksananya Permakanan	Rp. 900.000.000	
2.	Tersedianya Sandang	Rp. 103.065.000	
3.	Tersedianya Alat Bantu	Rp. 9.000.000	
4.	Tersedianya Perbekalan Kesehatan di Panti Sosial	Rp. 36.000.000	
5.	Tersedianya Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual	Rp. 24.000.000	
6.	Terlaksananya Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Rp. 10.000.000	
7.	Terlaksananya Pembuatan NIK bagi Lansia	Rp. 1.500.000	



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Mayjend D.I. Panjatan Nomor 12 Telepon (0536) 21582 dan FAX (0536) 24185  
**PALANGKA RAYA**

8.	Terlaksananya Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar	Rp.	10.000.000	
9.	Tersedianya Pemulasaraan	Rp.	74.000.000	
10.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Rp.	24.000.000	
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.	24.000.000	
12.	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Rp.	60.000.000	

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**EDDY KARUSMAN, ST., M.T**  
NIP. 19770207 200312 1 004